

BAB 5

SARAN

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan, saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Hendaknya mahasiswa PKPA diberi kesempatan untuk mengunjungi laboratorium yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur agar mahasiswa mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan di laboratorium tersebut.
2. Hendaknya mahasiswa PKPA diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung proses pengurusan izin kerja apoteker.
3. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur hendaknya memberi kesempatan kepada mahasiswa PKPA untuk mengunjungi departemen-departemen yang tugasnya berkaitan dengan dunia kefarmasian agar mahasiswa PKPA bisa melihat langsung apa saja yang dikerjakan dan memahami perannya dengan Departemen Kesehatan lain yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertina, M., Febriana, S., Firmanda, W., Permata, Y., & Gunardi, H. 2009. Kelengkapan Imunisasi Dasar Anak Balita dan Faktor-Faktor yang Berhubungan di Poliklinik Anak Beberapa Rumah Sakit di Jakarta dan Sekitarnya pada Bulan Maret 2008. *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 1, Juni
- Ali, M. 2003. Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Ibu Bekerja dan Ibu Tidak Bekerja Tentang Imunisasi. Tesis FK USU
- Dinkes.jatimprov.go.id.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Subdirektorat Pengendalian Arbovirus, Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Tentang Informasi Umum Demam Berdarah Dengue, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang *Tenaga Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2013 Waspada Balita Gizi Buruk Di Jawa Timur. Surabaya.
- Direktorat Penyehatan Lingkungan, 2013, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, 2015, Kebijakan Kesehatan Kerja, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Haddad L, Hawkes C, Udomkesmalee E, Achadi E, Bendeck MA, Ahuja A, et.al. Global Nutrition Report Washington: Independent Expert Group; 2014
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010, Demam Berdarah Dengue di Indonesia Tahun 1968-2009, Buletin Jendela Epidemiologi, (2): 1-48
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2010, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk Indonesia yang Lebih Sehat, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013, Pemantauan Status Gizi, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Survei Sample Registration System (SRS), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Riset Kesehatan Dasar 2018. Jakarta: 2018. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil Pemantauan Status Gizi 2016. Jakarta: 2017.

- Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2018. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting). Jakarta: TNP2K
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2003, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942 Tahun 2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi, Jakarta: Keputusan Menteri Kesehatan RI.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2007, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 843 Tahun 2007 Tentang Surveilans AFP, Jakarta: Keputusan Menteri Kesehatan RI.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB).
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 949/Menkes/SK/VIII/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa, Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan, Indonesia.
- Panduan Praktis BJPS Kesehatan. 2014. Pelayanan Kesehatan. Jakarta: BJPS Kesehatan.
- Panduan Praktis BJPS Kesehatan. 2014. Sistem Rujukan Berjenjang. Jakarta: BJPS Kesehatan.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur, 2016, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Surabaya: Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur, 2016, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Surabaya: Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Peraturan Kasal, 2011, Peraturan Kasal Nomor PER/KASAL/33/VI/2011 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Penanggulangan HIV/AIDS di Lingkungan TNI Angkatan Laut.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini KLB, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV/AIDS, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penggunaan Obat Antiretroviral, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak Serta Peran Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI.
- Peraturan Panglima TNI, 2012, Peraturan Panglima TNI Nomor KEP/680/VIII/2012 Tanggal 13 Agustus 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Penatalaksanaan Kasus HIV/AIDS di Lingkungan TNI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2013, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Jakarta: Peraturan Pemerintah RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, Jakarta: Peraturan Pemerintah RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Jakarta: Peraturan Pemerintah RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Jakarta: Peraturan Pemerintah RI.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2013, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Jakarta: Peraturan Presiden RI.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2015. Tuberkulosis Temukan Obat Sampai Sembuh. Jakarta: Infodatin.
- Rumende C. M. 2018. Diagnosis dan Tatalaksana Tuberkulosis Resistan Obat. Pertemuan Ilmiah Tahunan Ilmu Penyakit Dalam 2018. Jakarta.
- The Indonesian Association of Pulmonologist. 2006. Pedoman Penatalaksanaan TB (Konsensus TB). Jakarta: TIAP.
- Undang-Undang Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jakarta: Undang-Undang RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia, 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, Jakarta: Undang-Undang RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia, 2012, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Sanitasi Pangan, Jakarta: Undang-Undang RI.
- UNICEF. 1998. The State of The World's Children. Oxford University press
- World Health Organization, 2006, Dengue Haemorrhagic Fever: early recognition, diagnosis and hospital management, World Health Organization: Epidemic and Pandemic Alert and Response. New York: World Health Organization.
- World Health Organization, 2011, Comprehensive Guidelines for Prevention and Control of Dengue and Dengue Haemorrhagic Fever, Regional Office for South-East Asia: World Health Organization.
- World Health Organization, 2014, Commission on Ending Childhood: Noncommunicable Disease Surveillance, Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. 2016. Treatment Guidelines for Drug Resistant Tuberculosis. update.